

Partai Politik Dan Inkonsistensi Koalisi Dalam Pemilu 2014 Dan 2019

Oleh

Ade Priangani dan Kunkunrat

ade.priangani@unpas.ac.id dan kunkunrat@unpas.ac.id

Abstrak

Kejadian menarik dalam 2 (dua) pemilu terakhir, dimana ada fenomena partai-partai politik yang berkontestasi dalam pemilu tahun 2014 dan 2019 berupaya untuk menciptakan sebuah pemilu yang mengedepankan check and balances antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi dalam bentuk koalisi. Dalam pemilu 2014 ada pemerintahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), terdiri dari PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI, dan oposisi koalisi Merah Putih (KMP), terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB. Besar harapan rakyat terjadi check and balances sehingga pemerintah yang minoritas di kontrol oleh oposisi yang besar. Namun harapan itu sirna seiring dengan bergabungnya Golkar, PAN, dan PPP kedalam pemerintahan, sehingga oposisi tidak lagi berdaya, karena hanya meninggalkan Gerindra dan PKS. Kejadian berulang pada pemilu 2019, dimana dalam pilpres melahirkan 2 koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amien Koalisi Indonesia Kerja (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) dan Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yang bernama Koalisi Indonesia adil dan Makmur (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat), sangat terlihat adanya keinginan dari PAN dan Demokrat untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah, terjadi inkonsistensi dalam berkoalisi di Indonesia.

Kata kunci: Parpol, Inkonsistensi Koalisi, Pemilu.

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds dkk (2016) menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawa partai politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di

tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Juga bisa dikatakan sebagai salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya. Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1))

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemilihan umum berdasarkan pendapat Dieter Nohlen terdapat dua definisi. Yaitu pengertian sistem pemilu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum yaitu cara dimana pemilih bisa mengekspresikan pilihan politiknya dengan cara memberikan suara, dimana suaranya tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Harapan terbangunnya sebuah sistem pemerintahan yang mengerucut menjadi dua kekuatan besar sempat mengemuka pasca Pilpres 2014, ketika partai-partai politik penyokong Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB) mendeklarasikan Koalisi Merah Putih (KMP), dan selanjutnya partai-partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI) berhimpun dalam wadah Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Deklarasi KMP pada saat itu diyakini oleh para pemerhati politik sebagai langkah awal untuk membangun koalisi permanen sampai pada tingkatan yang paling bawah. Keyakinan itu diperkuat oleh sikap KMP yang mendorong Pilkada tidak langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di daerah, sebab partai-partai politik yang bernaung dalam KMP memiliki keterwakilan yang lebih besar di hampir setiap daerah, sehingga peluang untuk mengambil jabatan kepala daerah sangat besar. KMP memiliki harapan besar untuk mendapatkan kekuasaan di lebih dari 80 % daerah, sebab pada waktu pemilihan legislatif dimenangkan oleh partai-partai pendukung KMP.

Munculnya dua kekuatan dalam *blantika* politik Indonesia, ada harapan peta kekuatan politik akan mengerucut pada persaingan dua kekuatan besar, persaingan yang sehat seperti halnya di AS antara partai Republik dengan Demokrat, di Inggris Partai Buruh dengan Konservatif. Di dua negara tersebut, partai politik lebih dari 2, namun mereka berafiliasi dalam dua kekuatan politik diatas. Ketika yang satu berkuasa yang lainnya akan menjadi oposan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Harapan tersebut sirna seiring dengan dengan bergabungnya Golkar, PAN dan PPP kedalam koalisi pemerintah.

Setali tiga uang dalam pemilu 2019, dimana masyarakat terbelah pada dua koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, Golkar, PPP, Perindo, PSI) dan Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, yang bernama Koalisi Indonesia adil dan Makmur (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat), endingnya adalah adanya pergeseran kekuatan terutama yang sedang intens merapat ke pemerintahan yaitu Demokrat dan PAN.

Lalu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), koalisi malah lebih cair, artinya bisa saja koalisi yang dibangun untuk mengusung pasangan dari partai lintas koalisi besar, atau semua partai politik baik dari KIH maupun KMP mendukung satu pasangan yang memiliki kekuatan super dan diyakini akan memenangkan Pilkada. Bahkan yang membingungkan adalah adanya koalisi yang dilakukan oleh PDI-P dengan Gerindra, padahal kedua parpol tersebut adalah lokomotif di dua kubu yang berbeda dalam koalisi di tingkat nasional.

Partai-partai politik pada akhirnya memiliki sikap pragmatis yang menguntungkan bagi elite-elite lokal. Koalisi di daerah lebih berorientasi pada siapa yang berpeluang menjadi kepala daerah dibandingkan dengan *platform* partai, bahkan tidak jarang partai utama di KIH dan KMP bersama-sama mendukung satu pasangan.

Pertimbangan politik yang pragmatis dari partai-partai politik di Indonesia membuat masyarakat mengelus dada, dan bertanya masih adakah harapan untuk membangun kedewasaan politik ? atau masihkah ada pertimbangan ideologis dalam sikap partai politik?

Metode Pembahasan

Dalam membahas permasalahan diatas, penulis lebih cenderung mengemukakan opini, dengan didasari observasi langsung dengan melihat dan memperhatikan fenomena politik melalui aktifitas dalam timses pemilu dan pilkada, serta menyimpulkan dan mengkompilasi berita di media massa, baik elektronik maupun cetak, sehingga validasi data bisa dipertanggungjawabkan.

Tinjauan Teoretis

Koalisi adalah sebuah kelaziman dalam kontestasi politik di negara-negara yang berpaham demokrasi parlementer, tujuannya adalah untuk membangun kekuatan dari partai-partai politik yang notabene tidak dominan, apalagi dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dari penyelenggara pemilu yang tidak memungkinkan suatu partai politik sendirian berkontestasi dalam pemilu. Untuk memperbesar peluang menang, partai politik perlu mendapat mitra untuk memenuhi persyaratan dan sekaligus memperbesar peluang memenangkan kontestasi. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai.

Koalisi sendiri menurut Yudha Hariwardhana(2006), adalah persekutuan, aliansi atau gabungan dari beberapa unsur, yang mana dalam kerjasamanya, tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing. Koalisi pada umumnya berasas manfaat dan bersifat sementara.

Sedangkan Hugh F. Halverstadt berpandangan bahwa koalisi adalah suatu aliansi yang sifatnya sementara di sekitar agenda bersama atau nilai-nilai bersama. Koalisi bukanlah merupakan kumpulan kesepakatan yang sifatnya permanen dan mencakup segala sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata koalisi adalah ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen’. Arti kata koalisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memang lebih cenderung ke dalam dunia politik. Sebuah partai politik tidak akan mampu mengusung calon presiden dan calon wakil presiden tanpa berkoalisi. Hal ini disebabkan karena umumnya jumlah suara pemilih dalam suatu partai politik tidak akan cukup untuk memenuhi batas minimum suara yang diperlukan dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (KBBI)

Berdasarkan definisi tersebut, partai politik dalam pemerintahan seakan terbagi dalam dua kubu. Kalau tidak menjadi partai koalisi berarti menjadi partai oposisi. Hal ini lah yang menyebabkan kebanyakan orang berpikir jika arti kata koalisi dan arti kata oposisi merupakan dua kata yang saling berlawanan. Kenyataannya, koalisi bukanlah antonim dari oposisi. Arti kata koalisi bersinonim dengan kata aliansi, asosiasi dan federasi yang memiliki makna ‘bergabung’. Sedangkan arti kata oposisi bersinonim dengan kata antagonisme dan antitesis yang bermakna ‘bertentangan’. Seperti yang kita tahu, bergabung dan bertentangan bukanlah dua kata yang dapat diantonimkan.

Jadi dengan demikian koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai sedangkan oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi>)

Dalam pembentukan kekuatan pemerintahan di Indonesia, koalisi pertama kali dikenalkan oleh Dian Fernando Sihite, berdasarkan teori yang ia kemukakan sebuah pemerintahan akan sangat kuat apabila koalisi yang dibentuk merupakan koalisi bayangan artinya koalisi yang terbentuk bukanlah koalisi yang sesungguhnya. Koalisi bayangan juga berarti tidak ada koalisi namun pemerintah yang menguasai parlemen dan media menampilkannya sebagai suatu koalisi. Tidak adanya koalisi membuat kekuatan pemerintahan tersebut tidak akan terpecah pecah. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi>)

Maka menjadi sebuah kemajuan dalam berdemokrasi di Indonesia, partai-partai politik berafiliasi dalam koalisi yang mempertimbangkan ideologi, platform partai dan kesamaan arah dalam membangun bangsa. Namun yang disayangkan adalah inkonsistensi partai politik dalam berkoalisi.

Partai politik sendiri merupakan salah satu infrastruktur politik terpenting dalam sistem demokrasi modern. Cikal bakal partai politik muncul di Eropa Barat dari kumpulan orang-orang yang mengorganisir diri dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik. Adanya partai politik adalah indikasi sistem politik suatu negara yang sudah modern. Partai politik dijalankan secara rasional dengan logika birokrasi yang beroperasi dalam sistem manajemennya. (Sosiologis.com, 14 Maret 2018)

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Idiologi partai atau katakanlah platform partai, seyogyanya menjadi orientasi bagi semua anggotanya. Artinya kalau platform sudah ditetapkan sebagai orientasi partai maka semua komponen dalam partai tersebut menyesuaikan dengan keinginan bersama yang telah ditetapkan menjadi platform partai.

Sikap pragmatisme partai politik dalam pilkada memang tidak salah, namun hal ini menunjukkan kedangkalan tafsiran tentang politik, yang hanya diterjemahkan untuk meraih kekuasaan dengan berbagai cara.

Berkenaan dengan itu, koalisi idealnya bersandarkan pada kesamaan visi, misi atau juga orientasi untuk membangun kondisi Indonesia ke depan yang lebih baik, sehingga dengan demikian masing-masing koalisi akan menampilkan program-program yang terbaik untuk menarik simpati masyarakat, supaya dalam pemilu dan atau pilkada selanjutnya memilih partai-partai pendukung koalisi atau memilih Presiden dan Kepala Daerah yang didukung oleh koalisi tersebut.

Pembahasan

Bangunan koalisi idealnya tidak dibangun diatas pasir agar tetap kokoh sampai ke bawah. Kekuatan koalisi selayaknya tidak hanya di permukaan atau dalam jajaran elite saja, namun sebaiknya juga melibatkan pelaku-pelaku politik di daerah. Kalau bangunan itu kokoh, maka tidak ada perbedaan antara koalisi di elite berbeda dengan koalisi di daerah, atau keluarnya partai pendukung dari koalisi seperti yang dilakukan

oleh Partai Amanat Nasional (PAN), yang berubah haluan masuk menjadi bagian pemerintah yang diusung oleh KIH.

Ketidakajegan koalisi tersebut karena elite lokal atau juga partai yang keluar dari koalisi hanya sekedar mengejar tujuan jangka pendek (kekuasaan). Hal ini tidak terlepas dari kurang kuatnya ikatan komitmen dari koalisi yang dibangun. Tidak ada jaminan dari koalisi untuk meyakinkan anggota koalisinya, bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang terbaik, baik secara materil maupun non-materil. Dan tentu saja dengan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah akan mendapatkan *nutrisi* bagi pemilu berikutnya.

Hal ini dikarenakan, biaya pemilu di Indonesia sangat besar. Setiap partai politik harus mempersiapkan pendanaan untuk mengikuti pemilu (pileg, pilpres dan pilkada) pada periode selanjutnya. Dan mengingat partai politik tidak memiliki sumber pendanaan, karena belum lazim di Indonesia, partai politik menggantungkan pendanaannya dari iuran anggota, maka kader-kader mereka yang menduduki jabatan politik, baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, masih diandalkan untuk memenuhi kebutuhan operasional partai.

Selain dana partai, pemerintahpun menyediakan dana yang cukup besar untuk terlaksananya pemilu. Untuk pemilu tahun 2019 saja, kementerian keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan anggaran sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. (Detikfinance, 27 Maret 2019). Alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp 465,71 miliar; kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp 9,33 triliun, dan di tahun 2019 Rp 15,79 triliun, jadi total dalam 3 tahun Rp 25,59 triliun.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Namun karena manajemen partai belum sepenuhnya berjalan mandiri, maka seleksi kepemimpinan pun kerap kali mempertimbangkan calon pemimpin di luar kader partai yang memiliki *nutrisi* lebih. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan hal tersebut.

Begitupun dalam koalisi di daerah, koalisi menjadi lebih cair tidak serigid di tingkat nasional, sehingga bisa saja partai yang berada di KIH bergandengan dengan partai yang berada di KMP karena ada kecocokan yang sama berkaitan dengan tokoh yang dicalonkan.

Ketidakselarasan antara keinginan pimpinan pusa partai dengan pimpinan politik di daerah menyebabkan konstalasi koalisi di Pilkada sangat beraneka warna, pertautan relasi antar partai politik tidak tetap. Selayaknya apabila PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sudah menetapkan berorientasi pada koalisi Indonesia Hebat atau Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB sudah menetapkan orientasi partai dengan memakai kendaraan KMP, maka seluruh komponen dibawahnya menyelaraskan dengan platform yang sudah ditetapkan oleh partai.

Namun koalisi dalam Pilkada ini sangat kompleks, sebab pola hubungan koalisi tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Menurut data KOMPAS, 77,7 % parpol dalam pilkada cenderung membangun koalisi campuran, tidak memandang koalisi di tingkat nasional. (Kompas.com - 21/05/2019)

Melihat fenomena tersebut, maka perlu kiranya setiap partai politik mengoptimalkan pendidikan politik untuk membangun karakteristik politik partai. Dalam pendidikan politik juga harus ditekankan pentingnya etika politik sebagai fondasi membangun dan mengembangkan partai. Benang kusut koalisi parpol dalam pilkada menunjukkan bahwa partai politik kurang mampu untuk mengendalikan pengurus di daerah, sekaligus sebagai bukti kegagalan dalam pendidikan politik bagi anggotanya.

Koalisi Dalam Pemilu 2014

Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperoleh suara 53,15% ditetapkan oleh KPU RI pada 22 Juli 2014 dan dengan demikian terpilih menjadi Presiden-wakil presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Dalam pencalonannya Joko Widodo dan Jusuf Kalla didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Perstuan Indonesia (PKPI), tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Pasca Pilpres 2014, partai-partai politik mengerucut menjadi dua kelompok besar di parlemen (DPR RI), yaitu partai-partai politik penyokong Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB) mendeklarasikan Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi oposan terhadap pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan partai-partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura

dan PKPI) berhimpun dalam wadah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai koalisi pendukung pemerintah.

Sehubungan dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, maka Koalisi Indonesia Hebat menjadi koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Pasca kemenangan Jokowi-JK, Koalisi pendukung pemerintah bertambah, seiring dengan membelotnya Golkar, PAN, dan PPP kedalam koalisi pendukung pemerintah, sehingga ketika penyusunan kabinet ada power sharing dengan ketiga partai yang tadinya pendukung Prabowo-Hatta, sehingga komposisi menteri 5 menteri dari PDI-P, 2 menteri dari Partai Golkar, 2 menteri dari Partai NasDem, 4 menteri dari PKB, 1 menteri dari PAN, 1 menteri dari Partai Hanura, dan 1 menteri dari PPP.

Namun berkaitan dengan Pilkada, koalisi di tingkat pusat ternyata tidak selaras dengan koalisi dalam Pilkada. Kerap kali terjadi, diantara dua kutub besar Indonesia Hebat dan Merah Putih, berseberangan dengan anggota koalisi dan bermitra dengan lawan koalisi, seperti misalnya di Jawa Barat, PDIP sendirian mendukung pasangan TB. Hasanudin-Anton Charliyan, sementara PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura mendukung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Golkar memilih bergabung dengan Demokrat menjagokan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, dan koalisi Merah Putih yang tersisa Gerindra dan PKS, menggandeng PAN untuk mendukung Sudrajat-Achmad Syaikhul. Jadi koalisi di tingkat nasional KIH (PDIP, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, dan PAN) memilih berpecah, dan ada diantaranya yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih, yaitu PAN bergabung dengan Gerindra dan PKS, serta Golkar memilih gabung dengan Demokrat yang netral, dan PDIP memisahkan diri sendirian.

Untuk Sumatera Utara, Koalisi Indonesia Hebat, terpecah dua, ada yang bergabung dengan lawan koalisi (Gerindra dan PKS) serta Demokrat untuk mendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yaitu Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, Perindo, dan PKB. Sedangkan PDIP, PPP, PKPI dan PSI lebih memilih untuk mendukung pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Di Jawa Tengah, anggota Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDIP, PPP dan Nasdem, bergandengan dengan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen. Sedangkan PKB dan PAN memilih berpasangan dengan koalisi Merah Putih yang tersisa yaitu Gerindra dan PKS, untuk mendukung Sudirman Said-Ida Fauziah.

Sedangkan untuk Jawa Timur, anggota Koalisi Indonesia Hebat yaitu Golkar, PPP, Nasdem, PAN, Hanura, PKPI, PSI memilih bersama Demokrat untuk mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, daripada bersama PDIP. Sedangkan yang paling menarik untuk Jawa Timur adalah pendukung utama Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDIP bersama PKB dan Perindo, berada dalam satu kubu dengan Gerindra dan PKS mendukung Saifulah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Di Sulawesi Selatan, yang paling menarik adalah pecahnya dukungan Gerindra dengan PKS. Gerindra memilih bareng dengan PPP dan PBB mendukung Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo, sedangkan PKS memilih bareng PDIP dan PAN untuk mendukung Nurdin Abdulah-Sudirman Sulaiman. Sementara Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PKPI mendukung Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar.

Dilihat dari contoh-contoh Pilkada diatas, jelaslah bahwa koalisi di Indonesia masih cair dan tidak ideologis. Apalagi kalau kita tampilkan data-data Pilkada di tingkat Kabupaten dan Kota, bisa jadi lebih beragam.

Nasib Koalisi Pasca Pemilu 2019

Untuk Pemilu tahun 2019 pun Koalisi yang terjadi bisa jadi sama dengan koalisi pasca pemilu 2014. Meskipun penamaan koalisi berbeda, namun gaya dan tingkah lakunya sama. Dalam Pilpres 2019 pun, koalisi yang hadir adalah 2 (dua), sesuai dengan jumlah kandidat presiden. Joko Widodo-Ma'ruf Amien didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja (PDIP, PKB, PPP, Golkar, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI), sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur (Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat).

Pemilu 2019, dirasakan sebagai pemilu yang paling panas, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, berbagai politiking dan hoaks menjadi warna dominan, ditambah bumbu-bumbu seperti politik Indentitas, tuduhan kecurangan, darah yang tercecer, ratusan penyelenggara pemilu yang meninggal, teriakan kemenangan, dan juga teriakan kekecewaan.

Namun pasca pemilu 2019, di prediksi sama dengan yang terjadi pasca pemilu 2014. Ketika itu ada tiga partai, yang semula menjadi bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Hatta, kemudian berpindah haluan bergabung dalam koalisi pendukung presiden terpilih, yaitu Golkar, PPP dan PAN, dan kemudian Golkar dan PPP menjadi pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019, sedang PAN memilih kembali ke koalisi pendukung Prabowo.

Pada pasca Pilpres 2019 pun, besar kemungkinan dilihat dari manuver para petinggi partai, PAN akan kembali memberikan dukungan kepada koalisi pendukung presiden terpilih bersama-sama dengan partai Demokrat. Dan akan lebih menarik lagi apabila Gerindra pun turut dalam koalisi pendukung pemerintah.

Penutup

Sebagai penutup dari uraian diatas, maka penulis mencoba untuk menyimpulkan berbagai hal yang berkaitan dengan inkonsistensi partai politik dalam berkoalisi yang terjadi dalam blantika politik Indonesia.

Pertama, ternyata pemilu di Indonesia ini tidak mudah. Hal ini yang menyebabkan partai-partai politik mencari sumber keuangan partai, meski dengan meninggalkan gerbong koalisinya sekalipun.

Kedua, setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat yang berwarna, sehingga hal ini juga terbawa pada model koalisi untuk pilkada yang cair dan tidak rigid, karena ketua-ketua partai didaerahpun berupaya realistis dengan cara mendukung tokoh-tokoh yang memiliki kans besar untuk menang, meskipun calon tersebut sudah didukung oleh kubu lawan koalisi di tingkat nasional.

Ketiga, ketidak tersediaan anggaran dari pusat ke daerah, menyebabkan pimpinan partai di daerah kreatif untuk mencari nutrisi dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional partai di daerah.

Daftar Bacaan

Andrew Reynolds, Ben Reilly, Andrew Ellis.2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. ISBN: 978-602-73248-5-5.Stockholm, Sweden : International IDEA.

Hugh F. Halverstadt. 1991. *Managing Church Conflict*. English : Westminster John Knox Press; 1st edition (January 1, 1991)

Jessi Carina, Inggried Dwi Wedhaswary. 2019. *Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019*. Jakarta : Kompas.com, 21 Mei 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1, tentang Partai Politik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sosiologis.com, 14 Maret 2018

Detikfinance, 27 Maret 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi>